

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai Optimalisasi Fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan desa (BPD) Di Desa Naibone, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Menetapkan Standar (*standards*) standar, strategi, asas, jenis komunikasi serta pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait kinerja kepala desa dan juga penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Naibone sudah baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Pengukuran (*measurement*) keberhasilan, manfaat dari program serta maksimalnya interaksi dalam suatu sistem pemerintahan merupakan unsur yang menentukan optimalnya fungsi pengawasan. Jika dilihat dari segi manfaat dari program yang dijalankan maka fungsi pengawasan di Desa Naibone terkait dengan kinerja kepala desa dan juga penyelenggaraan pemerintah desa dapat dikatakan optimal, namun jika dilihat dari segi keterbukaan, komunikasi dan interaksi fungsi pengawasan dapat dikatakan optimal karena masih kurangnya unsur keterbukaan, komunikasi dan interaksi yang maksimal.
3. Membandingkan (*compare*) antara pemilihan jenis program dan implementasi program di Desa Naibone dapat dikatakan hampir maksimal alasannya adalah dilihat dari manfaatnya yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat namun

dalam implementasinya masih kurangnya unsur keterbukaan serta masih adanya perilaku nepotisme.

4. Melakukan Tindakan (*action*) berkaitan dengan hambatan serta kendalakendala yang ditemukan dalam melaksanakan pengawasan serta solusi yang diupayakan dalam penyelesaiannya. Hambatan yang ditemukan oleh BPD adalah masih kurangnya dana khusus BPD, kondisi geografis dusun yang berjauhan dan kurangnya keterbukaan kepala desa serta kurangnya komunikasi dan interaksi sehingga menyulitkan pelaksanaan fungsi pengawasan. Hambatan yang dialami oleh masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dilibatkan untuk melakukan pengawasan serta tidak adanya media publik untuk menyampaikan aspirasinya. Solusi yang ditawarkan oleh BPD adalah mengupayakan agar kepala desa lebih terbuka, proses komunikasi secara virtual namun belum maksimal serta pembentukan media publik sebagai media untuk menampung aspirasi masyarakat. Upaya yang ditawarkan tidak bisa diterapkan lagi kepada pejabat desa namun akan diterapkan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa yang baru.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti dapat memberikan saran yaitu :

1. Badan permusyawaratan desa harus lebih aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, melibatkan masyarakat Desa Naibone untuk ikut melaksanakan pengawasan, memaksimalkan komunikasi dan interaksi serta

lebih memaksimalkan asas keterbukan dan mencegah nepotisme demi keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan.

2. Badan permusyawaratan desa diharapkan bisa membentuk suatu media publik untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat terkait kinerja kepala desa dan penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Badan permusyawaratan desa diharapkan agar lebih banyak mempelajari dan memahami tugas pokok dan fungsinya serta meluangkan waktu untuk saling berkomunikasi antar BPD sehingga bisa membahas hal-hal krusial yang membutuhkan solusi.
4. Pemerintah desa Naibone diharapkan agar lebih terbuka dan mengimplementasikan program kerja secara merata tanpa membeda-bedakan masyarakat desa.
5. Masyarakat desa diharapkan agar bisa ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pengawasan baik secara fisik maupun non fisik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirdjo, P. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Ghalia: Jakarta.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Fera, M. 2018. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, VOL. 2. NO. 1 HAL 51 dan 58 Tahun 2018.
- George R. Terry, 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.
- Handyaningrat, 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Haji Masagung: Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hopni, T, dkk. 2018. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggraan Pemerintahan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, VOL. 1. NO. 1 HAL 1 dan 8 Tahun 2018.
- Huda, Nurul dan Muhammad Haikal, 2018. *Lembaga keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis*. Prenada Media: Jakarta.
- J. Moleong, Lexy.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja ROSDAKARYA:Bandung
- Lembaga Administrasi Negara. (1996). *Sistem Admnistrasi Negara*. Jakarta: LAN Gunung Agung
- Masuara, 2020. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah desa". Skripsi. Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Maxno, dkk. 2021. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengawasan Kepala Desa. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, VOL. 2. NO.1 HAL 1 dan 20 Tahun 2021.

- Monang, S. 2011. Pengaruh Dimensi-Dimensi Pengawasan Terhadap Perilaku Aparatur Dalam Pelayanan Perijinan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Unikom, VOL. 7. NO. 1 HAL 64-65 Tahun 2011.*
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Press“Veteran”: Yogyakarta.
- Musleh, 2019. “Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan desa Perspektif Syaikh Muhammad Abduh”. Skripsi. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nurrohman, B. 2017. Optimalisasi Pelayanan E-KTP guna Meningkatkan Validitas data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal 10 No. 6. Banten STISIP Banten Raya Pandeglang.*
- Rahmatullah, 2021. “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa”. Skripsi. Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Rita, H. 2018. Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance. *Jurnal Moderat, VOL. 4. NO. 4 HAL 115 dan 116 Tahun 2018.*
- Robbins, Stephen P.,Coulter Mary. 2005. *Management*. (H. Slamet & E. Lestari, Terjemahan) Indeks: Jakarta.
- Satriadi. 2016. Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada Sd Negeri Binaan Tanjungpinang. *Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.2. Hal. 290.*
- Siagian, Sondang P, 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial, Edisi Revisi Cetakan Pertama*. Bumi Aksara: Bandung.
- Sirfan, dkk. 2018. “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa”. Skripsi. Palu : Universitas Muhammadiyah.

- Sitanggang, 2022. “Optimalisasi Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja BPD”. Skripsi. Medan : Universitas HKBP Nommensen.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cv Alfabeta: Bandung.
- Sujamto, 1986. *Beberapa pengertian Dibidang Pengawasan, Cetakan 2*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sururama, dan Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemeirntahan*. Cendekia Press: Bandung.
- Tarsim, Erga, Y. 2018. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Hukum, VOL. 05. NO. 01 HAL 15 Tahun 2018*.
- Terry, George R. 1986. *Asas-asas Manajemen Alih Bahasa*; Winardi. Bandung: Penerbit Alumni.
- Wayan, S. 2021. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa. *Jurnal Cakrawati, VOL. 04 NO. 01 HAL 7 dan 8 Tahun 2021*.
- Winardi, 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

## **SUMBER LAIN**

<https://repository.unikom.ac.id/30485/1/vol-71-artikel-6.pdf>

KBBI, 1995. *Definisi Optimalisasi*. Debdikbud.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia